Inklusif: Jurnal Sosial Humaniora dan Peradaban Nusantara
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 107 - 115
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Inklusif/article/view/479
E-ISSN: 3164-4422

Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT SEN) dalam Mendukung Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Wilayah di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Jawa Tengah

Sukaryono[1], Boby Rahman[2]
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia [1,2]
Corresponding Author: *sukaryono.syukri@gmail.com[1*]*

Info Artikel
Received: *26 Agustus 2026*
Revised : *03 September 2026*
Accepted: *15 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *DTSEN, poverty, social assistance, regional planning, public policy.*

Abstract
Poverty remains a major and complex development issue in Indonesia. Various social assistance programs have been implemented by the government; however, their effectiveness is still constrained by problems related to data inaccuracy and lack of integration of beneficiary databases. To address this issue, the government developed the National Socio-Economic Single Data (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN) as an integrated database combining DTKS, P3KE, and Regsosek. This study aims to analyze the role of DTSEN in supporting area-based poverty reduction program planning in Batangan District, Pati Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The study was conducted in four villages: Jembangan, Mangunlegi, Batursari, and Kedalon. Data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of DTSEN has been carried out through a multi-stage process, starting from village-level proposals, field verification, eligibility validation, to data matching at the central level. However, the process still takes a relatively long time, approximately six months to one year, making it less responsive to the dynamic socio-economic conditions of the community. In addition, data accuracy issues such as inclusion errors and exclusion errors were still found, leading to targeting inefficiencies in social assistance distribution. Social impacts include the emergence of social jealousy and perceptions of unfairness within the community, while economically, social assistance helps meet basic household needs but remains short-term in nature. In conclusion, DTSEN plays an important role as a data instrument in supporting area-based poverty reduction planning. However, it still requires improvements in data updating processes, field validation, inter-sectoral data integration, and capacity building of implementing actors to ensure more accurate and responsive policy implementation.

Kata Kunci*:* DTSEN, kemiskinan, bantuan sosial, perencanaan wilayah, kebijakan publik.

Abstrak
Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di Indonesia yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program bantuan sosial telah dilaksanakan pemerintah, namun efektivitasnya masih terkendala oleh permasalahan utama berupa ketidaktepatan dan ketidakterpaduan data penerima manfaat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi

Nasional (DTSEN) sebagai basis data terintegrasi yang menggabungkan DTKS, P3KE, dan Regsosek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DTSEN dalam mendukung perencanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian difokuskan pada empat desa, yaitu Jembangan, Mangunlegi, Batursari, dan Kedalon. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DTSEN telah berjalan melalui mekanisme pengusulan dari desa, verifikasi lapangan, validasi kelayakan, dan penyandingan data pada tingkat pusat. Namun, proses tersebut masih membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar enam bulan hingga satu tahun, sehingga kurang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, masih ditemukan permasalahan akurasi data berupa inclusion error dan exclusion error yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Dampak sosial dari implementasi DTSEN meliputi munculnya kecemburuan sosial dan persepsi ketidakadilan di masyarakat, sedangkan dari sisi ekonomi, bantuan sosial berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga namun masih bersifat jangka pendek. Kesimpulannya, DTSEN memiliki peran penting sebagai instrumen data dalam mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pemutakhiran data, validasi lapangan, integrasi data lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aktor pelaksana agar lebih akurat dan responsif terhadap kondisi masyarakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Isu kemiskinan merupakan salah satu problematika paling fundamental dan persisten dalam pembangunan Indonesia. Meskipun laju penurunan angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dalam dua dekade terakhir, faktanya, jutaan warga Indonesia masih hidup dalam kondisi rentan dan berada di ambang kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial sejak era reformasimulai dari BPJS PBI atau yang sering kita kenal sebagai KIS (Kartu Indonesia Sehat), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), subsidi energi, hingga bantuan langsung tunai dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19, dan saat ini yang baru berjalan Adalah Bantuna Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kersra.

Ketidaksesuaian data antar sektor, ketidakterbaruan informasi rumah tangga, serta ketidakterhubungan antara sistem informasi lintas kementerian menyebabkan tidak hanya salah

sasaran dalam pemberian bantuan, tetapi juga duplikasi program, pemborosan anggaran negara, dan yang paling mengkhawatirkan, erosi kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dalam banyak kasus, rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan, sementara pihak yang tidak berhak malah tercatat sebagai penerima manfaat karena kesalahan data.

Menjawab urgensi tersebut, kebijakan pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, menjadi langkah strategis dan transformatif. Bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, P3KE yang dikembangkan oleh TNP2K dan Kemenko PKM untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Integrasi ketiga sistem ini diharapkan mampu membentuk satu platform nasional yang tidak hanya akurat dan terkini, tetapi juga interoperabel, mudah diakses lintas instansi, dan berkelanjutan dalam proses pemutakhiran datanya. Pendekatan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola intervensi sosial secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

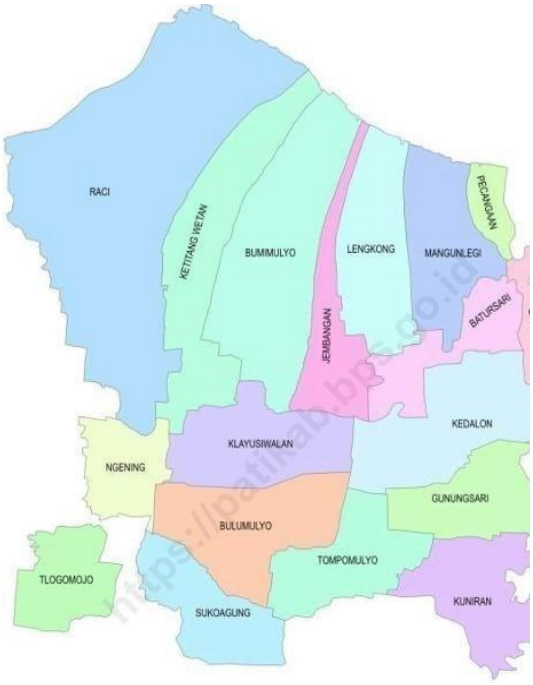
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*), data yang akurat, terbuka, dan terintegrasi menjadi syarat mutlak untuk mendorong pencapaian berbagai tujuan, khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan), dan SDG 16 (Institusi yang Inklusif dan Akuntabel). Beberapa studi kebijakan menyoroti pentingnya satu data (Bappenas, 2023; TNP2K, 2022), namun tidak secara mendalam menelaah bagaimana dinamika pelaksanaan dan hambatan lapangan berpengaruh terhadap tujuan besar pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

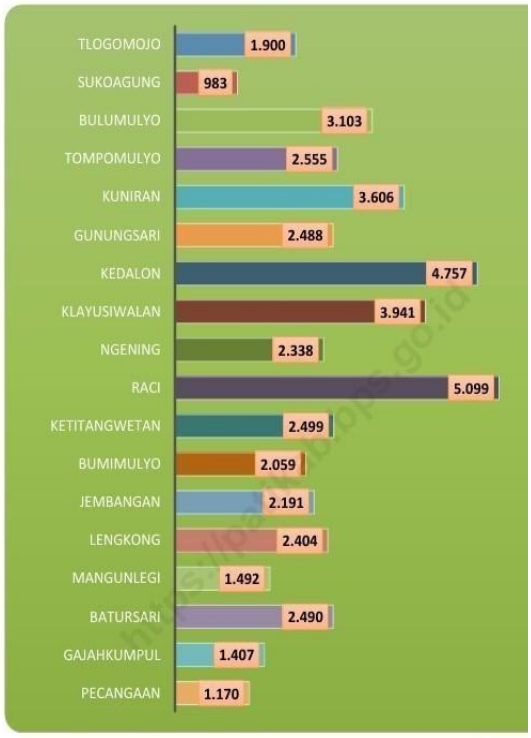
Hasil

Letak Geografis dan Administratif Kecamatan Batangan

Kecamatan Batangan merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif terdiri dari 18 desa. Penelitian ini difokuskan pada 4 desa: Jembangan, Mangunlegi, Batursari, dan Kedalon. Pemilihan 4 desa ini didasarkan pada perbedaan praktik implementasi DTSEN yang dipengaruhi oleh kapasitas operator desa, keaktifan pemerintah desa, dan koordinasi dengan pendamping sosial.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Batangan, 2024
Figures *Map of Batangan District, 2024*



Sumber/*Source* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati
Pati Regency Population and Civil Registration Service
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Desa Di Kecamatan Batangan, Desember 2024 (jiwa)
Figures ***Population by Sex in Batangan District, December 2024 (human)***

Gambar 1. *Peta Letak Geografis Kecamatan Batangan*

Data Kependudukan dan Administrasi 4 Lokasi Desa Penelitian

Tabel 1. *Data Kependudukan*

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	KK Pertanian	RT	RW
Jembangan	1120	1083	2203	815	417	15	2
Mangunlegi	756	747	1503	577	295	7	2
Batursari	1237	1257	2494	921	467	14	3
Kedalon	2382	2422	4704	1755	1250	20	40

Desa Kedalon memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 4.704 jiwa dengan 1.755 KK dan struktur administrasi 20 RT, 40 RW yang terbagi dalam 4 dukuh. Desa Mangunlegi memiliki jumlah penduduk paling sedikit, 1.503 jiwa.

Kondisi Sosial Ekonomi 4 Lokasi Desa Penelitian

Tabel 2. *Kondisi Sosial Ekonomi*

Desa	Mata Pencaharian Dominan	KK Pertanian	Keterangan
Jembangan	Petani	417	Mayoritaspenduduk bekerja sebagai petani
Mangunlegi	Petani garam, petani tambak ikan	295	Bekerja di tambak garam dan ikan
Batursari	Petani, pedagang	467	Kombinasi petani dan pedagang
Kedalon	Petani	1250	Petani sawah tadah hujan dan buruh tambak garam

Kondisi Implementasi DTSEN di Wilayah Penelitian

Implementasi DTSEN melalui alur pengusulan desa → pengecekan lapangan→ verifikasi kelayakan → penyandingan data tingkat lebih tinggi. Proses ini memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Aktor yang terlibat meliputi pemerintah desa, operator SIKS-NG, pendamping PKH, TKSK, Dinas Sosial, RT, dan masyarakat. Kendala utama yang ditemukan adalah lambatnya perubahan data, sistem aplikasi yang belum stabil, dan ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan.

Pembahasan

Analisis Proses Implementasi DTSEN di Wilayah Studi

Implementasi DTSEN di wilayah studi menunjukkan bahwa proses pendataan tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi melalui alur pengusulan dari desa, pengecekan lapangan, verifikasi kelayakan, dan penyandingan data pada tingkat yang lebih tinggi. Pengelolaan DTSEN melibatkan beberapa aktor, yaitu pemerintah desa, operator SIKS-NG, pendamping PKH, TKSK, Dinas Sosial, RT, serta masyarakat. Kendala implementasi DTSEN ditemukan pada aspek teknis, kelembagaan, dan kondisi lapangan. Secara teknis, aplikasi SIKS-NG masih menghadapi kendala server, fitur yang belum lengkap, dan proses input yang belum optimal. Secara kelembagaan, operator masih menghadapi keterbatasan pelatihan dan fasilitas. Secara lapangan, terdapat perbedaan antara kondisi riil warga dengan data yang muncul dalam sistem.

Analisis Peran DTSEN dalam Mendukung Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Dalam praktiknya, warga yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan tetap memperoleh

bantuan setelah adanya pembaruan data dari DTKS menuju DTSEN. Ketepatan sasaran bantuan sosial menunjukkan temuan yang beragam. Perubahan dari DTKS menuju DTSEN belum sepenuhnya dipersepsikan lebih baik oleh semua aktor. Operator melihat bahwa DTSEN memberikan peluang untuk memperbaiki data, tetapi proses perbaikannya masih dibatasi.

Analisis Dampak Sosial Penggunaan DTSEN dalam Penyaluran Bansos

Penerimaan masyarakat terhadap hasil pendataan DTSEN bergantung pada posisi masyarakat sebagai penerima atau non-penerima bantuan. Penggunaan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, terutama ketika warga membandingkan dirinya dengan penerima bantuan lain. Ketepatan data berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Analisis Dampak Ekonomi Penggunaan DTSEN terhadap Rumah Tangga Penerima

Informan menyebutkan bahwa bantuan berupa beras, minyak, dan uang benar-benar digunakan untuk kebutuhan keluarga. Informan KPM menegaskan bahwa bantuan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bagi KPM, bansos membantu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Bantuan pangan dan uang tunai dapat mendukung daya tahan ekonomi keluarga, terutama ketika pendapatan tidak stabil. Bansos memiliki keterbatasan karena lebih berfungsi sebagai bantuan jangka pendek.

Analisis Akurasi DTSEN dan Implikasi terhadap Perencanaan Wilayah

Penajaman prioritas perlu diarahkan pada kelompok yang sering terlewat, seperti rumah tangga baru, warga pindahan, atau warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi. Implikasi DTSEN bagi perencanaan wilayah adalah perlunya menjadikan data sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan program yang lebih tepat lokasi dan tepat sasaran. Namun, data harus dikombinasikan dengan validasi lokal agar tidak hanya bersifat administratif.

Analisis Upaya Perbaikan Pemutakhiran DTSEN

Kelemahan utama sistem pemutakhiran DTSEN adalah lambatnya proses perubahan data, belum stabilnya sistem aplikasi, dan masih adanya ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan. Perbaikan DTSEN membutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, khususnya operator SIKS-NG. Integrasi data menjadi kebutuhan utama dalam peningkatan kualitas DTSEN.

Diskusi dengan Teori

Hasil penelitian Diskusi dengan Teori mengenai peran DTSEN dalam mendukung perencanaan

program penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian & Sabatier. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah yang dihadapi, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi, dan variabel lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Teori ini relevan karena DTSEN merupakan instrumen kebijakan publik yang pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh desain data nasional, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana, koordinasi antaraktor, kondisi sosial masyarakat, dan dinamika lapangan.

Dari sisi karakteristik masalah, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis sehingga sulit diukur hanya melalui indikator administratif. Dari sisi struktur kebijakan, DTSEN telah memiliki mekanisme pendataan, pengusulan, verifikasi, dan validasi, tetapi proses tersebut masih memerlukan waktu panjang sehingga belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi rumah tangga. Dari sisi lingkungan implementasi, keberhasilan DTSEN dipengaruhi oleh kapasitas operator SIKS-NG, koordinasi desa, peran RT, pendamping PKH, TKSK, Dinas Sosial, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil pendataan.

SIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan DTSEN 2025 memberikan pengaruh signifikan terhadap akurasi perencanaan program. Dibandingkan dengan periode sebelum DTSEN yang masih menggunakan data usulan dan DTKS lama, perencanaan setelah DTSEN menjadi lebih tepat sasaran karena menggunakan data desil 1-4 sebagai dasar penetapan wilayah dan penerima manfaat. Hal ini terlihat dari fokus program di 4 desa prioritas yaitu Jembangan, Mangunlegi, Batursari, dan Kedalon. Unjuk kinerja program juga mengalami peningkatan, ditandai dengan berkurangnya tumpang tindih data dan penyaluran bantuan yang lebih sesuai dengan kondisi kemiskinan di lapangan. Namun demikian, masih terdapat kendala terkait keterlambatan pemutakhiran data dan pemahaman aparatur desa terhadap pemanfaatan DTSEN. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi DTSEN telah berjalan melalui mekanisme administratif dan verifikasi lapangan, namun prosesnya belum responsif terhadap dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Alur pendataan, pengusulan, pengecekan lapangan, verifikasi kelayakan, dan penyandingan data pada tingkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Durasi tersebut menghambat pembaruan status penerima bantuan sosial, terutama bagi rumah tangga yang membutuhkan intervensi mendesak.

3. Aktor lokal memiliki peran strategis dalam pengusulan dan validasi data, tetapi kewenangan penetapan penerima bantuan bersifat terpusat. Pemerintah desa, RT, operator SIKS-NG, pendamping PKH, dan TKSK berperan dalam pengumpulan serta validasi data lapangan. Namun, keputusan akhir terkait status penerima bantuan sosial ditentukan oleh sistem dan mekanisme di tingkat pusat, sehingga menimbulkan persepsi keterbatasan kewenangan pada tingkat desa.
4. Ketepatan sasaran DTSEN belum sepenuhnya tercapai akibat kendala teknis, kelembagaan, dan ketidaksinkronan data lapangan. Kendala pada aplikasi SIKS-NG, keterbatasan pelatihan operator, serta perbedaan antara kondisi riil dengan data sistem menyebabkan terjadinya *exclusion error* dan *inclusion error*.
5. DTSEN berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga penerima, namun dampaknya terbatas pada fungsi bantuan jangka pendek. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sosial yang disalurkan melalui DTSEN membantu memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar harian. Namun, bagi rumah tangga rentan yang belum terdata, kerentanan ekonomi tetap tinggi karena proses pemutakhiran data yang lambat. DTSEN memiliki potensi sebagai basis data perencanaan wilayah, namun memerlukan penguatan validasi lapangan dan integrasi data lintas sektor.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mempercepat proses pemutakhiran data DTSEN melalui penyederhanaan alur verifikasi dan validasi, khususnya bagi rumah tangga yang membutuhkan bantuan mendesak.
2. Meningkatkan kapasitas operator SIKS-NG melalui pelatihan berkala dan penyediaan fasilitas kerja yang memadai agar kualitas input dan validasi data dapat ditingkatkan.
3. Memperkuat integrasi data DTSEN dengan data kependudukan Dukcapil untuk mengurangi ketidaksesuaian identitas dan mempermudah proses verifikasi.
4. Membangun mekanisme pengaduan dan pemantauan warga yang jelas di tingkat desa agar rumah tangga yang merasa layak tetapi belum menerima bantuan dapat tercatat dan ditindaklanjuti.
5. Menjadikan DTSEN sebagai instrumen perencanaan berbasis wilayah dengan mengombinasikan data sistem dengan validasi lapangan, sehingga prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat lokasi dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy.

Scott, Foresman and Company.Peraturan & Dokumen Resmi

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Pedoman Pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jakarta: Kemensos RI.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Jakarta: Kemensos RI.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.Jurnal & Artikel Ilmiah

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

TNP2K. (2020). Menuju Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif: Evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

World Bank. (2022). Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review.

Jakarta: World Bank Group.Sumber Lain

BPS. (2024). Data dan Informasi Kemiskinan Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.Kementerian Sosial RI. (2025). Laporan Perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta: Kemensos RI.